

ANALISIS STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN NGANJUK

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

M WILDAN MAHMUD

0810210070



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS STRUKTUR EKONOMI
DAN IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN
DI KABUPATEN NGANJUK**

Yang disusun oleh :

Nama : M Wildan Mahmud
NIM : 0810210070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Juni 2015

Malang, 28 Agustus 2015

Dosen Pembimbing



Wildan Syafitri SE., ME., Ph.D

NIP. 19691210 199703 1 003

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS STRUKTUR EKONOMI
DAN IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN
DI KABUPATEN NGANJUK**

Yang disusun oleh :

Nama : M Wildan Mahmud
NIM : 0810210070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Juni 2015

Malang, 28 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

Wildan Syafitri SE., ME., Ph.D

NIP. 19691210 199703 1 003

**ANALISIS STRUKTUR EKONOMI
DAN IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN
DI KABUPATEN NGANJUK**

M Wildan Mahmud
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
Email: wildan_2m@yahoo.com

ABSTRAK

Era globalisasi sekarang ini, kota-kota besar maupun kawasan-kawasan strategis di Indonesia akan berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan dimana satu sama lain akan terikat dalam suatu sistem pengembangan dan saling ketergantungan (complementarity and independency). Di tingkat regional, pembangunan wilayah yang ditinjau dari aspek ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya Pemerintah Propinsi Jawa Timur masih mengalami kekurangan, yaitu masih terbatasnya pemberian wewenang kepada pemerintah lokal dalam mengelola potensi ekonominya. Untuk itu, agar pembangunan wilayah secara regional berjalan optimal, maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur idealnya dapat mendelegasikan wewenang kepada daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan dan mengelola wilayahnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor unggulan Kabupaten Nganjuk, besarnya peranan sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengklasifikasikan sektor perekonomian di Kabupaten Nganjuk ditinjau dengan pendekatan Tipologi Klassen Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis Shift Share laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Nganjuk terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 48,74 persen selama tahun 2010-2014. Pada hasil analisis LQ menunjukkan sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah sektor basis. Artinya sektor tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Selama kurun waktu 2010-2014 yang termasuk sektor basis terdapat pada sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan analisis tipologi kelas maka sektor perekonomian di Kabupaten Nganjuk pada sektor pertanian dan industri di Kabupaten Nganjuk termasuk ke dalam klasifikasi sektor maju dan tumbuh cepat. Sektor Bangunan dan Sektor Perdagangan, hotel dan restoran termasuk ke dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum; Angkutan dan Komunikasi; Bank, Lemkeu dan Jasa Perusahaan serta Jasa-Jasa termasuk ke dalam klasifikasi sektor potensial dan sektor pertambangan dan penggalian termasuk dalam klasifikasi sektor terbelakang.

Kata kunci: Sektor Unggulan, Shift Share, LQ, Tipologi Klassen

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan (Syafrizal, 1999).

Salah satu wilayah yang telah mengalami proses desentralisasi adalah Kabupaten Nganjuk, yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Posisi geografis yang sangat menguntungkan membuat Pemerintah Kabupaten Nganjuk sejak dulu hingga sekarang terus berupaya untuk mengembangkan dan mengelola wilayahnya sendiri yaitu dengan memajukan sektor unggulan daerah. Berbagai program telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berbagai program telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Adapun program utama Kabupaten Nganjuk adalah penentuan dan peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan atau sektor unggulan,

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan besarnya peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB suatu daerah, maka dapat dilihat arah kecenderungan struktur ekonomi daerah tersebut. Berkembangnya perekonomian suatu daerah akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan peranan setiap sektor berakibat perubahan struktur ekonomi daerah tersebut. Struktur perekonomian yang terjadi pada umumnya bergerak dari sektor pertanian menuju sektor industri selanjutnya ke sektor jasa. Proses struktural ini dapat berhasil dengan baik dengan memperlihatkan

sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif yang akan menjadi prioritas dalam perekonomian. Perencanaan pembangunan sebagai landasan membuat kebijakan pembangunan harus memperhatikan kondisi riil perekonomian, terutama kondisi sektor-sektor ekonomi yang ada, sehingga akan dapat diketahui sektor potensial yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian daerah (Ma'mun dan Irwansyah, 2012).

Penetapan rencana merupakan salah satu produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi rencana-rencana tersebut. Berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nganjuk harus berpodoman pada RPJM Nasional dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dipahami bahwa setiap daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk, mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Nganjuk perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Selain itu, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk, merupakan satu faktor yang menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah pada umumnya dapat dilihat dari berbagai sisi mulai dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Hal ini mengingat pembangunan dalam lingkup suatu wilayah kabupaten secara spasial tidak selalu merata. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak tingkat kesejahteraan antar wilayah yang pada akhirnya mengakibatkan ketimpangan regional antar wilayah semakin besar

Dengan mengembangkan produk unggulan, maka eksistensi suatu wilayah akan tetap terjamin. Oleh karena itu identifikasi dan analisis sektor ekonomi potensial menjadi hal penting bagi setiap kabupaten, apalagi untuk Kabupaten Nganjuk sebagai daerah otonom di Jawa Timur yang mengandalkan sektor pertanian untuk pembangunan daerahnya.

Dikarenakan beberapa hal yang disebut diatas, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan melakukan studi dengan melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Sumber Modal Non Bank Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Pasar Tradisional Di PPS Merjosari”.

B. KERANGKA TEORI

Ekonomi Pembangunan

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata, namun memiliki perspektif yang luas. Dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik. Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, dikenal 4 pendekatan, yaitu: (1) Teori pertumbuhan linier, (2) Teori pertumbuhan struktural, (3) Teori revolusi ketergantungan internasional (*dependensia*), (4) Teori Neo-Klasik (Todaro dan Smith, 2006)..

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan atau dikenal sebagai *economic development is growth plus change*, yaitu pembangunan ekonomi. Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolok ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non ekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan. Tolok ukur – tolok ukur kemakmuran, apapun pendekatannya serta dari manapun sudut tinjauannya, pada umumnya akan konsisten. Oleh karena itu meskipun tolok ukur tinjauan pendapatan bukan satu-satunya tolok ukur, namun tetap relevan dan yang paling lazim diterapkan (Sukirno, 2001).

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang ada di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut (Tarigan, 2005).

Sektor Unggulan

Tumenggung dalam Sitorus (2006) memberi batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan

manfaat yang besar. Mawardi dalam Sitorus (2006) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor

Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Aglomerasi Teori basis ekonomi (*Economic Base Theory*) mendasarkan pandangan pada laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar daerah yang juga disebut sebagai kegiatan basis. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong kegiatan ekonomi wilayah. Tenaga kerja yang berdomisili di suatu wilayah, tetapi bekerja dan memperoleh uang di wilayah lain termasuk dalam pengertian ekspor (Yusuf, 1999)

Perubahan Struktur Ekonomi

Teori-teori perubahan struktural memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh W.Arthur Lewis yang terkenal dengan model teoritisnya tentang “surplus tenaga kerja dua sektor” (two sektor surplus labor) dan Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” (patterns of development) (Todaro, 2000).

Lokasi

Ahli ekonomi yang mengenalkan teori lokasi paling awal adalah Johann Heinrich Von Thunen yang merumuskan teori lokasi berdasarkan pengalamannya selama empat puluh tahun sebagai pengelola pertanian di Rostock di daerah Meclenburg (Wibowo dan Soetrisno, 2004). Salah satu penemuan terpenting Von Thunen adalah lingkaran *Von Thunen* yang menjelaskan jenis-jenis komoditi pertanian yang akan berada di daerah perkotaan. Namun laju perkembangan teori lokasi baru dikenal sebagai teori yang bulat sesudah dikembangkan ilmu regional yang dipelopori Walter Isard pada tahun 1952. Selama ini masalah dimana lebih menarik perhatian pakar geografi daripada pakar ilmu ekonomi (Wibowo dan Soetrisno, 2004)

Desentralisasi Daerah

Dalam waktu yang cukup lama sejak orde baru, Pemerintah Indonesia telah tergiring untuk menjadikan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari seluruh kebijakan pemerintah. GBHN dan Repelita sebagai instrumen utama dari penyelenggaraan Pemerintah orde baru dengan syarat konsep dan rencana pembangunan. Namun kebijakan yang penuh dengan sentralisasi telah mendorong bangsa ini ke jurang krisis moneter. Akibatnya banyak Pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak bisa berbuat banyak terhadap dampak tersebut. Ini disebabkan bahwa pemerintah pusat telah menggunakan banyak waktu dan energinya untuk mengurus masalah-masalah domestik yang sebenarnya sudah bisa diurus oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk untuk mewujudkan pembangunan wilayah agar tidak tersentralisasi adalah dengan konsep pembangunan yang penuh desentralisasi (Tarigan, 2005).

Pembangunan Wilayah

Conyers and Hills dalam Tarigan (2006) menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dari berbagai pendapat dan definisi yang kemudian berkembang mengenai perencanaan, secara umum hampir selalu terdapat dua unsur penting, yaitu (1) hal yang ingin dicapai, dan (2) cara untuk mencapainya (Rustiadi, 2007)

Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan

Pada perencanaan ekonomi regional, para pelaksana dan pengambil keputusan menghadapi tantangan bagaimana caranya agar perekonomian wilayah tersebut dapat mencapai keadaan yang lebih baik di masa mendatang dibandingkan dengan keadaan sekarang. Pada daerah yang belum berkembang, Hirschman dalam Todaro (1989), mengemukakan bahwa pembangunan tidak seimbang (imbalance growth) adalah model pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Alasan yang mendasari model ini adalah secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang; mempertinggi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia dan pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*bottleneck*) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya

C. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan metode deskriptif ini penulis mencoba membuat satu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi. Untuk melengkapi penulisan hasil penelitian, dalam pengumpulan data dilakukan melalui *Library research* adalah suatu metode untuk mendapatkan informasi dari teori / konsep dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku literature yang berhubungan dengan materi yang di bahas.

Metode Analisis

Analisis *Shift Share* yaitu untuk menentukan indikator kegiatan ekonomi seperti pendapatan dan kesempatan kerja. Di Indonesia pendapatan di suatu wilayah dicerminkan oleh nilai PDRB (tingkat kabupaten, kota dan propinsi) dan PDB (tingkat nasional).

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (*basic sector*) dan sektor mana yang bukan sektor basis (*non basic sector*). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas atau digunakan juga untuk membandingkan pendapatan antara sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada daerah atas terhadap pendapatan total semua sektor di daerah atasnya.

Metode Analisis *Klassen Typology* digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan daerah ini, dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan daerah

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat $111^{\circ} 5'$ sampai dengan $111^{\circ} 13'$ BT dan $7^{\circ} 20'$ sampai dengan $7^{\circ} 50'$ LS. Batas wilayah Kabupaten Nganjuk, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Pada wilayah bagian timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, serta Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Kondisi Ekonomi Kabupaten Nganjuk

Untuk mengamati kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk, salah satunya dapat dilihat dari sisi struktur ekonominya. Dengan melihat angka-angka distribusi persentase, bisa dikatakan perekonomian Kabupaten Nganjuk bertumpu pada sektor primer. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dinilai dari harga berlaku maupun harga konstan.

Di indikasikan hampir semua pedagang di PPS Merjosari tidak memiliki manajemen tersendiri dalam hal pengelolaan keuangan unit usaha. dari informasi yang didapat dari responden. Pengelolaan keuangan usaha dan rumah tangga bercampur menjadi satu, tidak ada pengelolaan tersendiri untuk unit usaha yang sedang digeluti. Seperti yang terjadi di PPS Merjosari, sebagian besar pedagang PPS Merjosari enggan untuk meminjam ke lembaga keuangan formal seperti bank, dan lembaga pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usaha yang sedang mereka geluti. Keengganan pedagang PPS Merjosari memiliki alasan yang beragam, seperti keengganan dengan sistem agunan yang dikenakan oleh pihak bank, syarat administrasi yang "ribet", serta kenyamanan memakai modal sendiri yang dikarenakan faktor resiko usaha dan ketidak pastiannya.

Pada banyak kondisi dilihat dari kebutuhan akan dana segar serta faktor kebutuhan hidup yang kian mendesak, membuat pedagang tradisional pada kondisi tertentu memerlukan pinjaman dari pihak eksternal. Peluang inilah yang kemudian dilirik oleh lembaga keuangan nonformal seperti Bank Harian untuk kemudian memanfaatkan kondisi pedagang tradisional. Di daerah studi banyak pedagang tradisional yang masih menggunakan jasa Bank harian (*Bank Thitil*) untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

Perubahan dan Rasio PDRB

Tabel 4.3 : **Perubahan PDRB Kabupaten Nganjuk dan Propinsi Jawa Timur Menurut Sektor Perekonomian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 (juta rupiah)**

Sektor	PDRB Kabupaten Nganjuk		Perubahan PDRB Kabupaten Nganjuk	PDRB Provinsi Jawa Timur		Perubahan PDRB Propinsi Jawa Timur
	2010	2014		2010	2014	
1	1.524.740	1.973.582	448.842 (29,44)	39.354.488	49.012.233	9.657.745 (24,54)
2	35.419	39.151	3.732 (10,54)	5.495.073	5.455.159	-39.914 (-0,73)
3	177.380	218.160	40.780 (22,99)	63.396.901	71.786.972	8.390.071 (13,23)
4	59.133	57.490	-1.643 (-2,78)	4.378.885	4.610.041	231.156 (5,28)
5	96.931	119.115	22.184 (22,89)	8.293.319	9.030.294	736.975 (8,89)
6	991.130	1.474.250	483.120 (48,74)	57.926.650	81.739.125	23.812.475 (41,11)
7	60.995	75.508	14.513 (23,79)	13.245.296	15.104.139	1.858.843 (14,03)
8	106.872	157.559	50.687 (47,43)	11.656.351	12.611.228	954.877 (8,19)
9	425.779	593.271	167.492 (39,34)	17.785.422	23.048.439	5.263.017 (29,59)
Total	3.478.379	4.708.086	1.229.707 (35,35)	221.532.385	272.397.630	50.865.245 (22,96)

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 dan 2014, (Diolah)

Keterangan:

1 = Sektor Pertanian; 2 = Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3 = Sektor Industri Pengolahan; 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; 5 = Sektor Kontruksi; 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8 = Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9 = Sektor Jasa-jasa; () = Persentase perubahan PDRB sektor perekonomian di masing-masing wilayah

Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Nganjuk menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 48,74 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Nganjuk. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus meningkatkan pelayanannya di sektor tersebut. Selanjutnya pada urutan terakhir ditempati oleh sektor listrik, gas dan air bersih dengan pertumbuhan terkecil yaitu (-2,78) persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk kurang berpotensi di sektor tersebut. Selain itu produksi yang dihasilkan juga semakin menurun dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Sektor Unggulan Kabupaten Nganjuk

Sektor unggulan daerah, pada dasarnya adalah sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar pada daerah, bukan hanya untuk daerah itu sendiri namun juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. Dengan melihat data PDRB maka beberapa sektor unggulan daerah dapat diketahui. Guna menentukan apakah suatu sektor tergolong basis, salah satu metode yang digunakan yakni metode Location Quotient (LQ). Metode LQ menggambarkan tingkat kemampuan sektor tersebut untuk menyumbang terhadap kebutuhan ekonomi regional.

Tabel 4.7 : **LQ Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Nganjuk Terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014**

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	1,69	1,62	1,62	1,60	1,60
Pertambangan dan Penggalian	0,76	0,80	0,76	0,81	0,79

Industri	0,89	0,09	0,93	0,93	0,90
Listrik. Gas dan Air Minum	0,84	0,83	0,84	0,87	0,86
Bangunan	0,11	0,10	0,09	0,10	0,11
Perdagangan, Restoran dan Hotel	1,08	1,10	1,09	1,13	1,12
Angkutan dan Komunikasi	0,41	0,38	0,38	0,37	0,37
Bank, Lemkeu dan Jasa Perusahaan	1,00	0,98	0,98	1,00	0,99
Jasa-Jasa	0,59	0,57	0,59	0,58	0,58

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2014 (Dianalisis)

Dari perhitungan nilai LQ per subsektor pada sektor pertanian menunjukkan pola nilai LQ seperti terlihat pada Tabel 4.7. Hasil perhitungan, subsektor tanaman bahan pangan menunjukkan nilai LQ lebih dari 1 dan nilainya tetinggi dibandingkan subsektor-subsektor lainnya pada sektor pertanian.

Klafikasi Sektor Perekonomian Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Tipologi Kasen

Berdasarkan Tipologi Klassen sektor perekonomian Kabupaten Nganjuk dapat diklasifikasikan menjadi sektor prima, sektor potensial, dan sektor terbelakang. Dan diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor berkembang cepat, sektor maju tetapi tertekan, sektor relative tertinggal.

Tabel 4.10 : **Klasifikasi Sektor Ekonomi menurut *Klassen Typology***

r \ y	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Sektor maju dan tumbuh cepat Pertanian Industri	Sektor berkembang cepat Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran
$r_i < r$	Sektor maju tetapi tertekan Listrik. Gas dan Air Minum Angkutan dan Komunikasi Bank, Lemkeu dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa	Sektor relatif tertinggal Pertambangan dan pnggalian

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan pada bab-babsebelumnya, dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaiberikut:

1. Terdapat dua sektor unggulan Kabupaten Nganjuk yang menjadi basis ekonomi daerah, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan tujuh sektor lainnya termasuk ke dalam sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
2. Hasil analisis *Shift Share* menunjukkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik begitu juga pada sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.
3. Inti dari strategi kebijakan pembangunan adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah dengan memperdayakan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sektor unggulan daerah dan mengikutsertakan sektor non basis sebagai penunjang sektor unggulan daerah.

4. Klasifikasi sektor perekonomian di Kabuapten Nganjuk berdasarkan tipologi klasen yaitu sektor pertanian dan industri di Kabupaten Nganjuk termasuk ke dalam klasifikasi sektor maju dan tumbuh cepat. Sektor Bangunan dan Sektor Perdagangan, hotel dan restoran termasuk ke dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Sektor Listrik. Gas dan Air Minum; Angkutan dan Komunikasi; Bank, Lemkeu dan Jasa Perusahaan serta Jasa-Jasa termasuk ke dalam klasifikasi sektor potensial dan sektor pertambangan dan penggalian termasuk dalam klasifikasi sektor terbelakang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor unggulan daerah dalam mencanangkan pembangunan daerah dan mengikutsertakan sektor non basis sebagai penunjang keberadaan sektor basis.
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk seharusnya ditingkatkan untuk mengembangkan sektor basis terutama sektor pertanian yang mulai berkurang yaitu dengan ditingkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pengembangan konsep agroindustri dan agropolitan sebagai suatu strategi kebijakan sektor unggulan.
3. Dalam mencanangkan pembangunan, pemerintah daerah sebaiknya menggunakan kekuatan dan peluang sebaik-baiknya untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang selama ini menjadi beban pembangunan daerah.
4. Saran penelitian lanjutan perlu dilakukan pendekatan secara regional untuk menentukan aspek lokasi yaitu di daerah mana sektor tersebut akandibangun atau dilaksanakan selain itu juga perlu dikaji sektor unggulan ditingkat propinsi..

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W., 2001. *Kajian Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Wilayah Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan-LIPI. Jakarta.
- Adiatmojo, G. D., 2003. *Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan basis Pertanian (di Kabupaten Musi Banyuasin)*. Makalah Pengantar Falsafah Sains Program Pasca Sarjana /S3, IPB, Bogor.
- Ambardi, U.M., dan P. Socia. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. P2KTPW-BPPT. Jakarta.
- Amir, H. dan S. Nazara., 2005. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) dan Kebijakan Strategi Pembangunan Jawa Timur Tahun 1994 dan 2000: Analisis Input Output*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Vol. V No. 02, 2005, hal 37 – 55
- Anwar, A. dan S. Hadi., 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. Majalah Prisma – Jurnal Kajian Ekonomi dan Sosial Edisi 25 Tahun 1996. Hal: 49–62.
- Arief, S., 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. BP-STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, L., 1999, *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4, Cetakan Pertama, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik., 2013. *PDRB Kabupaten Nganjuk 2010-2013*. <http://jatim.bps.go.id/Tabel/PDRB.htm>. [30 September 2014]
- Basuki, A. T dan U. Gayatri., 2010. *Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 10, Nomor 1, April 2010: 34 - 50*

- Batra dan Khan. Z., 2005. *Revealed Comparative Advantages: An Analysis for India and China*. Jurnal Indian Council For Research On international Economics Relations (ICRIER) 2005 (Agustus): 5-6.
- Boediono., 1981. *Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi*. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Budiharsono, S., 1995. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PAU-EK-UI . Jakarta.
- Budiharsono, S., 2001. *Teknis Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir danLautan*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daryanto A. 2004. *Keunggulan Daya Saing dan Teknik Identifikasi KomoditasUnggulan dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Regional*. Agrimedia Vol. 9 No. 2 Desember 2004. Bogor: MMA IPB.
- Ernawati, S., 2007. *Analisis Daya Saing dan Strategi Pengembangan Agribisnis Anggrek di DKI Jakarta*. *Skripsi*. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Glasson, J.,1990. *Pengantar Perencanaan Regional (Bagian Satu dan Dua)*. Paul Sitohang [penerjemah](1990). Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta.
- Hidayat, A, dan Riphath S. 2005. *Analisis Sektor Unggulan Untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jatim Menggunkan Tabel Input-Output Tahun 1994 dan 2000*. Jurnal Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan RI. Edisi Desember 2005
- Hidayat, J.A.J., 2013. *Analisis Struktur Perekonomian Di Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 930-938
- Kuncoro, M. dan Sutarno. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antarKecamatan di Kabupaten Banyumas, 1992-2003*. *Jurnal EkonomiPembangunan*. Volume.8 No.2:97-110. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat dan Aswandi H., 2002. *Evaluasi Penetapan KawasanAndalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*”, *JurnalEkonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No.1.
- Ma'mun, D dan S. Irwansyah., 2012. *Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Dan Identifikasi Sektor Potensial Wilayah Pengembangan (Studi Kasus Di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Social Economic of Agriculture, Volume 2, Nomor 1, April 2013, hlm 7-28
- Miradani, S.D., 2010. *Analisis Perencanaan Pembangunan Agroindustri Provinsi Jawa Timur : Pendekatan Sektoral dan Regional*. Tesis. Prgram Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Miyarto., L. Soetrisno dan M. Dove., 1993. *Studi Antar Sektor Ekonomi Dalam Kaitannya dengan Usaha Peningkatan Kesempatan Kerja di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Perguruan Tinggi. Buku III Bidang Hukum dan Ekonomi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Nazara, S., 1997. *Analisis Input Output*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Rahmaddi, Rudy dan M. Ichihashi., 2012. “The Changing Pattern of Export Structure and Competitiveness in Indonesia’s Manufacturing Sectors: an Overview and Assessment”. *2nd International Conference on Economics, Trade and Development IPEDR vol.36*. Singapura : IACSIT Press.
- Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21)*. PT. Gramedia. Jakarta
- Riyadi, D.S.2005. *Dampak Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionaliasi Terhadap Pengembangan Wilayah*. (P2KTPW-BPPT), Jakarta
- Rustiadi, E, S. Saefulhakim dan Panuju, D.R., 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor: Materi Kuliah Program Studi PWD Pascasarjana IPB.

- Salvatore, D., 1997. *Ekonomi Internasional Edisi Kelima*, penerjemah Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.
- Sambodo, M. T dan A. Gufron., 2002. *Analisis Sektor Unggulan Di Kalimantan Timur*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. X : 33.
- Sitorus, R.H. 2006. *Identifikasi Sektor Unggulan untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Toba Samosir* [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Bagian Barat. *Prisma*. Volume XXVI. Nomor 3, 27-38. Jakarta.
- Sjafrizal., 1999. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Soepono, P., 1993. *Analisis ShiftShare, Perkembangan dan Penerapan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume VIII. No.1.
- Sukirno, S. 2001. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma. Jakarta
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tarigan, R., 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tarigan, R., 2007. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Thoha, M. dan M. Soekarni., 2000. *Studi Kelayakan Ekonomi Pembentukan Propinsi Baru : Kasus Banten*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. VII: 45-77.
- Todaro, M. 1989. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P. dan S.C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke-3*. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P. dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Munandar, H dan A.L. Puji [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P. dan Stephen C. S., 2000. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Haris dan Puji [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Yunan, Z.Y., 2010. *Analisis Sektor Unggulan Kota Bandar Lampung (Sebuah Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB)*. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Yusuf, M. 1999. *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model : Wilayah Bangka-Belitung*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Jakarta.